



PENGARUH PAJAK DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL: BUKTI EMPIRIS TAHUN 2014 – 2024

Vivi Adeyani Tandean¹
STIE Wiyatamandala¹
vivi.tandean@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the effect of tax and inflation on national income. This type of research is quantitative research. Data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and Bank Indonesia, then processed using IBM SPSS Statistics 22 for Windows. This research using data multiple regression analysis. The results of this research show tax has an effect on national income and inflation no has an effect on national income. This study proves that taxation still has a significant influence on the government's efforts to increase national income and provides empirical evidence for the government to formulate effective taxation policies to strengthen the country's fiscal position.

Keyword: Tax, Inflation, National Income

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pajak dan inflasi terhadap pendapatan nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, kemudian diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 22 untuk Windows. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional. Penelitian ini membuktikan bahwa pajak masih menjadi pengaruh besar bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional serta menjadi bukti empiris bagi pemerintah untuk membentuk sebuah kebijakan yang efektif dalam bidang perpajakan untuk meningkatkan kekuatan fiskal negara.

Kata Kunci: Pajak, Inflasi, Pendapatan Nasional

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator dalam ekonomi makro yang sangat penting. Secara teori, ketika pembangunan ekonomi sebuah negara semakin maju, maka pendapatan nasional, baik secara keseluruhan maupun per kapita, juga akan meningkat. Biasanya, pendapatan nasional per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Namun, indikator ini sebenarnya bukan satu-satunya, karena rasa sejahtera masyarakat juga dipengaruhi oleh seberapa merata pendapatan tersebut dibagikan. Pada dasarnya, pendapatan nasional sangat berpengaruh untuk semua lapisan masyarakat. Contohnya, petani sangat terdampak jika pendapatan nasional turun, karena biasanya harga hasil panen mereka juga ikut jatuh. Begitu juga pekerja, jika pendapatan nasional dan produksi menurun, peluang kerja akan berkurang dan pengangguran meningkat. Penurunan



pendapatan nasional bisa memicu berbagai masalah ekonomi. Karena itu, upaya meningkatkan aktivitas ekonomi demi menaikkan pendapatan nasional jadi tujuan utama pembangunan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Bagi pelaku bisnis seperti investor, eksportir, produsen, hingga bankir, pendapatan nasional sangat memengaruhi strategi dan keputusan mereka, terutama jika dilihat dari sisi riil setelah memperhitungkan inflasi. Pendapatan nasional yang besar, jumlah penduduk dan struktur demografis juga memberi gambaran tentang seberapa besar potensi pasar sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, makin tinggi pula minat investor menanamkan modal, dan pihak bank pun lebih percaya diri untuk menyalurkan kredit. Bagi negara-negara yang menerima bantuan atau pinjaman, pendapatan nasional juga jadi tolok ukur penting bagi para pemberi pinjaman maupun bantuan dan lembaga keuangan internasional dalam menilai apakah bantuan yang diberikan memberi dampak nyata bagi pembangunan ekonomi di negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional sangat krusial karena berhubungan langsung dengan taraf hidup, masa depan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat, yang biasanya diukur dari rata-rata pendapatan per kapita. Namun demikian, pendapatan nasional dipengaruhi oleh penerimaan dari seluruh aktivitas ekonomi antara lain penerimaan pajak dan inflasi.

Pendapatan nasional adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk menilai ekonomi negara dan mendapatkan informasi tentang keadaan serta kualitas outputnya. Data dari pengkajian nasional yang telah dikumpulkan dapat digunakan untuk membuat sebuah perkiraan untuk waktu menjelang pergerakan ekonomi Bangsa. Keterampilan ini dapat diberikan kepada mereka yang ingin memulai bisnis untuk berkontribusi pada pertumbuhan masa depan dan untuk meningkatkan ekonomi perencanaan untuk menjadikan kesibukan ekonomi di masa yang akan datang (Achmad Fauzi et al., 2023).

Pendapatan nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk pajak dan inflasi. Di Indonesia, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung kebutuhan anggaran negara. Pada tahun 2023, pemerintah mencatat rasio perpajakan sebesar 10,31% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Doli Syahputra et al., 2025).

Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara dan memiliki kontribusi yang besar dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Karena dengan tinggi tingkat penerimaan pajak yang diterima pemerintah akan memperlancar pemerintah dalam melakukan pembangunan yang merata karena ketersediaan dana yang cukup untuk pembangunan yang merata sehingga roda pemerintahan semakin lancar (Sihaloho, 2020)

Pendapatan pemerintah sebagian besar bersumber dari pajak. Ketika penerimaan pajak dialokasikan sebagai modal dalam kegiatan produktif, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkembang di Asia, telah berupaya untuk secara optimal dalam



perkembangan ekonominya. Saat ini, penerimaan pajak di Indonesia telah berkontribusi secara signifikan terhadap berbagai proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah (Prihatiningsih & Susanti, 2023).

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Kebijakan perpajakan yang efektif akan mampu meningkatkan pendapatan dan mendukung pelaksanaan program Pembangunan karena penerimaan pajak yang optimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, inflasi merupakan penyakit ekonomi yang umumnya ditemui hampir di semua negara di seluruh dunia yang harga-harganya cenderung naik terus menerus (Simanungkalit, 2020). Inflasi selalu kita upayakan untuk tetap kecil dan stabil untuk menghindari terjadinya permasalahan makroekonomi yang berdampak negatif yaitu ketidakstabilan perekonomian negara. Inflasi yang tinggi mengacu pada ketidakstabilan perekonomian negara, yang terus menerus menaikkan tingkat harga barang dan jasa dan pada akhirnya menyebabkan melemahnya perekonomian negara dan peningkatan kemiskinan. Semakin tinggi inflasi maka semakin kecil pula daya beli masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dan pada akhirnya berujung pada kemiskinan (Ayudana Kezia et al, 2024)

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia (Salim dan Purnamasari, 2021).

Ditengah ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas, pada tahun 2023, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun, dengan rasio pajak terhadap PDB sebesar 10,31%. Sampai akhir Desember 2024, kinerja pendapatan negara tahun 2024 mampu mencapai Rp2.842,5 T atau 101,4% dari target APBN 2024 atau mengalami pertumbuhan positif 2,1% yoy. Penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong oleh peningkatan dari jenis penerimaan pajak utama. Secara terperinci, penerimaan pajak yang sifatnya transaksional berupa PPh 21, PPh final, dan PPh dalam negeri mengalami pertumbuhan *double digit*, karena ada beberapa aktivitas di dalam pembayaran gaji, THR, dan aktivitas ekonomi retail yang juga semakin membaik. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai komponen signifikan memiliki rasio stabil terhadap pendapatan nasional antara 7%–9% selama 2010–2022, menunjukkan



daya tahan kontribusi PPN pada penerimaan negara, meski sempat menurun saat pandemi COVID-19 pada 2020. Pemerintah memperluas basis pajak, termasuk digitalisasi, tercatat hingga Januari 2025, penerimaan pajak digital sebesar Rp33,39 triliun. Peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pembiayaan lebih besar untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan peningkatan pendapatan nasional. Namun, pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat atau investasi privat, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Oleh karena itu, keseimbangan dalam kebijakan fiskal sangat penting agar pajak tetap memberikan manfaat optimal pada pertumbuhan pendapatan nasional.

Selama 2014–2024, inflasi menunjukkan penurunan yang stabil dan berhasil dikendalikan setelah lonjakan tahun 2014 dan 2022. Inflasi pada tahun 2014 sebesar 8,36%. Inflasi yang tinggi ini disebabkan salah satunya karena adanya kenaikan harga BBM yang mendorong harga barang, jasa transportasi, dan konsumsi lainnya meningkat signifikan. Selanjutnya, selama tahun 2015 sampai dengan 2019, inflasi mengalami penurunan dan relatif stabil, rata-rata sekitar 3% setiap tahun. Adapun besarnya inflasi pada tahun 2015 sebesar 3,35%, tahun 2016 sebesar 3,02%, tahun 2017 sebesar 3,61%, tahun 2018 sebesar 3,13%, dan tahun 2019 sebesar 2,72%. Hal ini memberikan dampak yang positif secara makro ekonomi serta mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, Indonesia mengalami kondisi inflasi sangat rendah akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan permintaan agregat. Pada tahun 2020, inflasi sebesar 1,68% dan tahun 2021 inflasi sebesar 1,87%. Rendahnya inflasi pada masa ini mencerminkan tekanan pada sisi permintaan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional sempat terbatas. Inflasi mengalami kenaikan pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Besaran inflasi pada tahun 2022 yaitu 5,51% karena tekanan global, lalu menurun pada tahun 2023 sebesar 2,61% dan terus melandai hingga 1,57% pada akhir tahun 2024. Kondisi ini disebabkan oleh penguatan koordinasi kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam stabilisasi harga pangan dan energi. Inflasi yang moderat menjadi pendukung utama pertumbuhan pendapatan nasional di Indonesia, sementara inflasi ekstrem (tinggi/rendah) punya efek negatif pada konsumsi, investasi, dan output nasional. Keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi mutlak dibutuhkan dalam kebijakan ekonomi makro Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berupa catatan dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya (Muhajirin&Panorama, 2017). Data sekunder yang digunakan berupa data Inflasi yang disajikan oleh Bank Indonesia (BI) dan data total penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disajikan oleh Badan



Pusat Statistik (BPS) dengan berdasarkan deret waktu (*time series*) yang diambil dari periode sebelas tahun terakhir yaitu. 2014-2024.

Pendekatan penelitian kuantitatif bersifat konfirmasi karena berfokus pada pengujian hipotesis dan teori. Dalam aktivitas penelitian, seorang peneliti menyatakan hipotesis terlebih dahulu, kemudian mengujinya dengan data empiris untuk melihat apakah hipotesis tersebut didukung (Johnson & Christensen, 2014). Metode penelitian ini menjadi primadona dalam penelitian sejak abad 19 hingga sepanjang abad 20. Metode ini didasarkan pada pandangan postpositivist (John W. Creswell & Creswell, 2018). Teknik Analisa dalam penelitian adalah menggunakan Analisa regresi berganda.



ANALISIS DAN PERANCANGAN

1. Uji Kelayakan Model

a. Uji F (Simultan)

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17262646050206.550	2	8631323025103.275	54.945	<,001 ^b
	Residual	1256715141692.359	8	157089392711.545		
	Total	18519361191898.910	10			

a. Dependent Variable: PDB

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Pajak

Sumber: SPSS (diolah), 2025

Berdasarkan hasil uji diatas, diketahui nilai F hitung 54.945 dan nilai Sig adalah <,001. Diketahui nilai Sig <0,001 < 0.05 dan F hitung 54,945 > F table 4,737, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak dan inflasi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasional periode 2014 – 2024.

b. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determiniasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.965 ^a	.932	.915	396345.042

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Pajak

Sumber: SPSS (diolah), 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada table diatas diketahui nilai keofisien dterminasi adalah 0,932. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel pajak dan inflasi mampu mempengaruhi pendapatan nasional sebesar 93,2% dengan sisanyaa sebesar 6,8% dijelaskan oleh faktor lain.

2. Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis (T)



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6706427.031	637816.239	10.515	<,001
	Pajak	2.907	.331	.846	<,001
	Inflasi	-19330101.726	6628678.342	-.281	.019

a. Dependent Variable: PDB

Sumber: SPSS (diolah), 2025

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa nilai variabel pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari alpha ($<,001 < 0,05$), sehingga variabel pajak berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Variabel inflasi memiliki nilai signifikansi lebih besar dari alpa ($0,19 > 0,05$), sehingga variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan nasional

Berdasarkan data hasil olah data diatas dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan bagi pemerintah, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketika pajak meningkat, pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional (Doli Syahputra et al, 2025).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pajak yang diproaksikan dalam total penerimaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan nasional yang diproaksikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2014-2024.
2. Inflasi yang diproaksikan dalam inflasi pertahun tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan nasional yang diproaksikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2014-2024.
3. Pajak dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang diproksikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2014-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi, Muhammad Rizki Nazala, Bima Nugroho, Hanna Meitha Maryama, & Mukhayatul Khamdillah. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 40–49. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i2.712>
- Ayudana Kexia Pasaribu, Muhammad Aryo Fachrezi, Ranjani Nurafilah, Reyhani Intan Sabrina, Irena Breta BR Surbakti, Nurlela, & Disya Ayu. (2024). Dampak Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (PDB) Periode



- Creswell, John W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In SAGE Publications, Inc. (Fifth Edit). London EC1Y 1SP: SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Doli Syahputra Hasibuan, Lilis Sartika Sihite, Nazwa Aulia, & Divo Valentino Siboro. (2025). Analisis Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional: Bukti Empiris Tahun 2018 – 2024. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Volume 4, Nomor 2, April 2025*. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3959>
- Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. In R. Hester, T. Accomazzo, L. Barrett, & P. L. Fleming (Eds.), SAGE Publications, Inc. (California). Singapore: Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9781351004626-12>.
- Prihatiningsih, B. E., & Susanti, A. (2023). Mufakat Mufakat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Salim, A., P., & Anggun Purnamasari, R. F. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–27.
- Sihaloho, Estro Dariantio. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *FORUM EKONOMI*, 22 (2) 2020, 202-209 ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Management (SME's)*, 13(3), 327–340.

www.bi.go.id

www.bps.go.id